

Gerakan Ekonomi Islam Pada Era Pra Kemerdekaan

Riswan Rambe

Universitas Potensi Utama Medan

Abstract

This research is aimed to know the background of economic movement conducted by SDI, Muhammadiyah and NU and analyzing the obstacles faced by SDI, Muhammadiyah and NU in Islamic economic movement. The research method used in this research uses library study method with qualitative approach. The result of this conclusion can be concluded that the patterns of SDI movement, Muhammadiyah, and NU have a contemporary, traditional-conservative economic ideology. The existence of a positive influence on the movement of SDI to the Muslim community, among others, the lifting of indigenous traders became strong, and eliminating discriminatory treatment to indigenous traders. A good influence on the Muhammadiyah movement to the people, both their growing economy and their human resources, is better, one example of the pre-economy by establishing the BMT of the Ummah and the Muhammadiyah Bank. And also the economy of the people due to the influence of Nahdlatut Tujjar and establish the Shirkah Muawwanah cooperative in pesantren-pesantren. The movements provided by SDI, Muhammadiyah, and NU to the community have had a positive impact on the social, economic, social, and social issues.

Keywords: SDI, Muhammadiyah, Nahdlatut Tujjar, ekonomis, Islamic

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang gerakan ekonomi yang dilakukan SDI, Muhammadiyah dan NU dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh SDI, Muhammadiyah dan NU dalam gerakan ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa pola gerakan SDI, Muhammadiyah, dan NU memiliki tinjauan ideologi dibidang ekonomi yang bersifat modern, tradisional-konservatif. Adanya pengaruh yang positif terhadap gerakan SDI kepada masyarakat muslim

diantaranya terangkatnya pedagang pribumi menjadi kuat, dan menghilangkan perlakuan diskriminatif kepada pedagang pribumi. Pengaruh yang baik terhadap gerakan Muhammadiyah kepada masyarakat baik prekonomian mereka yang meningkat maupun SDM mereka lebih baik, salah satu contoh dari prekonomian dengan mendirikan BMT umat dan Bank Muhammadiyah. Dan juga perekonomian masyarakat akibat dari pengaruh *Nahdlatul Tujjar* dan mendirikan koperasi *Shirkah Muawwanah* di pesantren-pesantren. Gerakan yang diberikan oleh SDI, Muhammadiyah, dan NU kepada masyarakat sangat memberikan dampak yang positif baik itu dari ideologi, politik, sosial terlebih khusus dibidang ekonomi.

Kata Kunci: SDI, Muhammadiyah, Nahdlatul Tujjar, ekonomi, Islam

Pendahuluan

Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 didirikan di Solo oleh Haji Samanhoe, bermula sebagai Sarekat Dagang Islam, berdasarkan koperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam, agama yang terbesar dalam masyarakat Indonesia. Sarekat Dagang Islam terus melaju dengan sangat pesatnya hal ini menunjukkan bahwa Sarekat Dagang Islam adalah organisasi yang telah lama diinginkan oleh rakyat umum (juga di antara kaum pedagang dan kalangan agama).

Salah satu bukti hasil gerakan ekonomi Muhammadiyah adalah mendirikan koperasi, BMT, dan BPR Syariah dan lain sebagainya yang ditujukan untuk membantu taraf hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat pada pra kemerdekaan, begitu juga dibidang pendidikan dan kesehatan yang dijadikan untuk membantu masyarakat. Gerakan-gerakan ini sangat berdampak positif kepada masyarakat pada waktu itu, tetapi hambatan yang diterima oleh ormas Muhammadiyah ialah pemerintahan Belanda dan Jepang selalu menghalang-halangi program gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, akibatnya koperasi, BMT dan BPR Syariah tidak bisa berkembang secara maksimal.¹

Selanjutnya gerakan NU (Nahdlatul Ulama) dilatarbelakangi karena keterbelakangan sikap dan mental serta prekonomian yang dialami masyarakat

pribumi akibat dari penjajahan Belanda dan Jepang, setelah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul tersebut dikenal dengan Nahdlatul Ulama.²

Kekuatan prekonomian NU sebenarnya terletak pada potensi pengembangan kemandirian di pedesaan dan di pesantren-pesantren yang terintegrasi menjadi satu wadah dalam ormas NU, cara NU dalam memberdayakan pesantren-pesantren melalui metode beternak, bertani, berdagang dan melalui koperasi pesantren. Contoh pesantren yang diberdayakan NU adalah pesantren Sidogiri di Pasuruan, pesantren *Nurul Jadid* di Probolingga, pesantren Drajaat di Lamongan dan pesantren-pesantren yang lainnya. Sehingga santri-santri yang keluar dari pesantren sudah terlatih mandiri dengan berwirausaha. Begitu juga hasil gerakan ekonomi di pedesaan NU dengan mendirikan *Syirkatul Inan* di Jombang, *Syirkatul Muawwanah*, dan BMT NU yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu.³

Namun dalam gerakan ormas NU dalam mengembangkan prokonomian pesantren dan pedesaan tidak jarang dihentikan oleh pemerintah Belanda, karena pemerintah Belanda tidak menyukai apabila ada masyarakat pribumi yang makin kuat prekonomiannya yang nantinya menggulingkan pemerintahan Belanda dari Indonesia.

Tulisan ini peneliti memberi batasan kajian yaitu penulis hanya meneliti awal lahirnya gerakan-gerakan ormas Islam (SDI, Muhammadiyah dan NU) berbasis ekonomi Islam sampai kemerdekaan RI artinya gerakan ekonomi yang dilakukan SDI sejak awal lahirnya dari tahun 1905-1945, gerakan ekonomi Muhammadiyah dari 1912-1945, gerakan ekonomi NU dari 1926-1945.

Penelitian ini sudah termuat dalam karya Syahbudi dengan judul jurnal "Pemikiran dan gerakan ekonomi Islam di Indonesia" beliau menyimpulkan bahwasanya pemikiran tokoh-tokoh seluruh ormas Islam baik itu tokoh dari SDI, Persis (persatuan Islam), Al-Irsyad, Muhammadiyah, Mathla'ulanwar, Majelis Islam A'la Indonesia (MAI), Lascar Hijbullah, Perserikatan, NU, Masyumi dan lain sebagainya sangat memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan

prekonomian masyarakat pra era kemerdekaan.⁴ Miftahuddin dalam tulisannya menyimpulkan peran ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia dalam kemerdekaan dengan gerakan agama, politik dan ekonomi.⁵ Namun peneliti dalam hal ini peneliti lebih kosen meneliti gerakan ekonomi yang dilakukan oleh SDI, Muhammadiyah dan NUsamapai kemerdekaan RI yaitu fokus pada latarbelakang munculnya gerakan ekonomi ormas Islam dan hasil gerakan ekonomi yang dilakukan oleh SDI, Muhammadiyah dan NU. Berdasarkan hal ini, maka peneliti ingin mengamati lebih lanjut dan lebih mendalam tentang gerakan Ekonomi Islam pada era pra kemerdekaan.

Kajian Terdahulu

Lukman Santoso dalam tulisannya menyatakan bahwa tipologi gerakan serikat Islam (gerakan sosial Islam) lebih memberikan kontrsbusi dengan menggunakan gerakan *Fundamentalis-Radikal* artinya dalam mengamalkan Islam itu harus menyeluruh baik itu dari pemerintahannya maupun paying hukumnya, begitu juga dengan mengaplikasikan ekonomi dalam kehidupan harus secara tersturktur dengan Islam.⁶

Sedangkan menurut Syahbudi, bahwa pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia mencakup gerakan *Formalis –Simbolik, Fundamentalisme-Radikal* dan *Rasional-Inklusif* untuk memberikan kontribusi pemahaman Islam kepada semua umat Islam bahwa ekonomi Islam itu menganut pemahaman seperti ini di Indonesia.⁷

Miftahuddin menyatakan bahwa masalah kesenjangan prekonomian umat muslim, dan kondisi hidup mereka sangat memprihatinkan sebelum kemerdekaan, maka sekelompok ormas muslim seperti Muhammadiyah langsung memberikan peran mereka seperti membuat Bank Muhammadiyah yang ditujukan untuk membantu tarap kehidupan mereka, dan adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatip interpertatip dan library riset. Peran ormas ormas Islam sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan kesenjangan kehidupan masyarakat muslim pada zaman sebelum kemerdekaan.⁸

Syarifuddin Jurdi juga menyatakan tipologi gerakan Islam di Indonesia mempunyai 4 tipologi diantaranya *Fundamentalisme-Radikal, Formalis-Simbolik, Rasional-Inklusif* dan *Emansipatoris-Transformatif*. Sementara dalam tulisan ini hanya membahas gerakan Islam *Konservatif* atau *Moderat*.⁹

Kajian Teori

Teori Mobilisasi Sumber Daya (*resource mobilization theory*) menekankan pada faktor teknis dan sejarah penyebab munculnya gerakan sosial di Indonesia. Teori ini menjelaskan betapa pentingnya pendayagunaan secara efektif dalam menunjang gerakan sosial dan ekonomi, karena gerakan sosial dan ekonomi yang berhasil memerlukan organisasi dan taktik.

Dalam teori ini, kepemimpinan organisasi dan taktik, merupakan faktor utama yang menentukan sukses atau gagalnya suatu gerakan ekonomi. Dalam hal ini juga, sumber daya yang dimaksud bisa saja seperti pandangan dan tradisi penunjang. Peraturan hukum yang mendukung organisasi dan pejabat yang dapat membantu, manfaat yang mungkin untuk dipromosikan, kelompok yang dapat terikat oleh manfaat tersebut dan sumber daya penunjang lainnya.¹⁰

Genealogi Gerakan Sosial Islam Indonesia

Akar ideologis gerakan sosial Islam selalu merujuk pada paham Wahabisme yang merupakan istilah yang memiliki makna bahwa itu berasal dari pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Muhammad ibn Abd Wahhab (1703-1792) yang menentang segala bentuk praktek keagamaan yang tidak bersumber pada Al-Qur'an Sunnah. *Takhayul, bid'ah dan khurafat* (TCB) yang sangat terkenal itu sebagai bentuk tingkah laku yang tidak Islami.

John O. Voll mendefinisikan Wahabisme sebagai “prototipe fundamentalisme yang kaku dalam pengalaman Islam moder”, karena gerakan ini mengambil sikap yang keras dalam mendefinisikan siapa yang bisa dianggap beriman, dengan mensyaratkan bahwa tidak boleh ada penyimpangan terhadap syar'iah, dan membedakan secara ketat antara dunia orang beriman dan mereka yang tidak beriman.¹¹

Blok Politik Gerakan Sosial Islam dan Pembentukan Gerakan

Pada masa lalu, kemunculan gerakan sosial Islam atau dapat disebut sebagai blok politik, setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam tiga *melting pot* yakni Yogyakarta dan sekitarnya, Bandung-Jakarta dan Surabaya. Pembentukan Muhammadiyah dan Sarekat Islam merupakan gerakan sosial Islam yang lahir dari struktur masyarakat Jawa (Yogyakarta) dengan orientasi gerakannya pada pemurnian agama, modernisasi, pemberdayaan ekonomi serta transformasi sosial masyarakat. Pembentukan Persatuan Islam sebagai satu blok gerakan sosial Islam modernis lahir di Bandung Jawa Barat yang juga memiliki visi sosial keagamaan yang sama yakni berorientasi pada visi modernis Islam. Terakhir pembentukan NU di Surabaya oleh sebagian kalangan menyebutnya sebagai blok tradisional dan menjadi satu kekuatan gerakan sosial Islam yang mengalami kemajuan dalam struktur pergerakannya.

Tiga wilayah kemunculan gerakan sosial Islam tersebut, blok Yogyakarta dan Surabaya merupakan blok yang sukses melakukan ekspansi dan terus bertahan hingga kini.

John Lofland¹² memperkenalkan enam aspek penting guna memahami aspek penting bangunan gerakan, yaitu :

- a. Aspek kepercayaan.
- b. Aspek organisasi gerakan sosial.
- c. Sebab-sebab timbulnya gerakan sosial.
- d. Keikutsertaan setiap gerakan sosial.
- e. Strategi setiap gerakan sosial.

Tipologi Gerakan Sosial Islam Indonesia

Tipologi artikulasi gerakan sosial Islamakan termanifestasi dalam berbagai kegiatan atau cara merespons suatu kondisi sosial politik dan keagamaan bangsa. Secara sosiologis dan historis, tipologi artikulasi gerakan sosial Islam di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam lima tipologi artikulasi, tipologi yang didasarkan kondisi obyektif masyarakat Indonesia. Abdullah Saeed membagi gerakan sosial Islam, yaitu :¹³

- a. Gerakan sosial Islam *ideal-radikal*,¹⁴
- b. Gerakan sosial Islam *pragmatism-moderat*.¹⁵ Gerakan organisasi sosial

keagamaan yang besar yang memiliki aliran *pragmatis-moderat* seperti Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah dan NU.¹⁶

c. Gerakan sosial Islam *liberal*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), artinya data dan bahan penelitian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik itu berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah dan lainnya. Sifat penelitian ini adalah *study kualitatif interperatip*.¹⁷

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari seluruh karya yang ditulis langsung oleh organisasi-organisasi yang akan diteliti tersebut terutama yang berkaitan dengan gerakan-gerakan ekonomi yang dilakukan oleh ormas tersebut¹⁸ dan juga diperoleh dari buku, tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan, ditambah dengan penelitian-penelitian dalam disiplin ilmu ekonomi dan politik dan sejarah yang berkaitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan *Library research*. dengan metode triangulasi.¹⁹

Hasil Penelitian

Hambatan SDI dalam Pemberdayaan Ekonomi

a. Faktor Internal

Adanya “Gerakan Penyusupan” ke dalam tubuh Serikat Islam yang berhasil mempengaruhi tokoh - tokoh muda SI seperti Semaoen, Darsono, Muso Alimin Prawirodirdjo, dan H. Misbach, untuk tujuan yang sama yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme namun dengan cara yang berbeda. Hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan pada Serikat Islam, yaitu Serikat Islam Merah yang berhaluan Komunis Serikat Islam Merah dipimpin oleh Semaun dan Darsono, Serikat Islam Putih dipimpin oleh Agus Salim dan Abdul Muis, Cokroaminoto.

Perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam mencapai puncaknya pada saat diadakan kongres luar Biasa Central Sarekat Islam di Surabaya pada tanggal 6-10

Oktober 1921. Kongres ini memutuskan Semaoen dan anggota Sarekat Islam yang merangkap menjadi anggota PKI secara resmi dikeluarkan dari Sarekat Islam.²⁰ Hal ini menjadi hambatan SDI dalam melakukan gerakan ekonomi kerakyatan sehingga Belanda berhasil menguasai perekonomian pribumi pada saat itu.

b. Faktor Eksternal

Salah satu faktor eksternal yang menjadi hambatan adanya perselisihan antara pedagang batik dari golongan Islam dengan pedagang batik Tionghoa. Hal ini menyebabkan pemerintah Belanda ikut campur dan membatasi ruang gerak Sarekat Dagang Islam. Sehingga kegiatan Sarekat Dagang Islam terus diawasi oleh pemerintah.

Adanya faktor persaingan dagang dari kalangan Cina di mana bangsa Cina mendapat dukungan dari pemerintah Belanda dalam melancarkan usahanya, sehingga mereka mampu mendirikan suatu perkumpulan dengan nama *Hwan Kuan*, tepatnya pada tahun 1900 di Jakarta.²¹ J.S Furnivall menulis bahwa pada tahun 1892 penggantian kain pribumi dengan bahan impor yang dibeli oleh pengrajin batik melalui perantara Tionghoa, mengakibatkan pemegang kekuasaan dalam perdagangan ini beralih ke tangan Cina.

Akhirnya, pada tahun 1911, untuk melawan praktek curang dari pengusaha Cina maka pedagang batik Jawa di Surakarta membentuk Sarekat Dagang Islam. Robert Van Niel menulis bahwa selain faktor tekanan ekonomi, pada saat itu juga kain batik yang dipakai sebagai bahan dasar untuk seluruh proses membatik disediakan oleh pabrik Eropa yang telah menggeser tenunan pribumi pada abad yang lampau. Kain batik ini tiba ke tangan pedagang kecil melalui perantara Cina. Dan juga bahan celupan kimia yang menjadi bahan impor dan dikuasai oleh Pengusaha Cina. Hal ini menyebabkan bahwa adanya kesempatan besar menarik keuntungan dari pengusaha Cina karena pengendalian bahan dasar impor yang dikuasai oleh mereka. Sehingga para pengusaha Cina menguasai industri batik pada saat itu.²²

Berdasarkan sebab-sebab ekonomis dan sosial maka pedagang Indonesia di Surakarta memutuskan untuk membentuk organisasi perdagangan Indonesia

antara kalangan pedagang batik yang diprakarsai oleh Haji Samanhoedi. Organisasi ini pada dasarnya bersifat amal dan protektif.²³

Hasil Gerakan Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi

Muhammadiyah banyak dikenal sebagai organisasi Islam yang modern oleh masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. KH. Ahmad Dahlan, pada masanya, adalah kiai yang kontroversial. Ide-idenya melawan arus pemikiran dan sikap umum para kiai lainnya. Beliau mendirikan sekolah-sekolah model Belanda, mendirikan rumah sakit yang melibatkan tenaga medis dari kalangan Belanda. Pada bagian lain beliau juga menafsirkan Al-Ma'un secara berbeda, dengan membaca kondisi masyarakatnya.²⁴

Lembaga pendidikan dan rumah sakit Muhammadiyah sangat membantu memajukan taraf hidup umat Islam di Indonesia yang jumlahnya ribuan, ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa gemilang, yang berangkat dari ide KH. Ahmad Dahlan yang kontroversial kalau kita hidup pada masanya mungkin juga akan menentang ide beliau karena tidak sesuai dengan mainstream umat Islam saat itu. Bahkan saat itu banyak yang menganggap beliau kafir.²⁵ K.H. Mas Mansur, Ketua Muhammadiyah menetapkan ketetapan yang menjadi fokus Muhammadiyah dibidang ekonomi sebagai hasil kongres ke-26 tahun 1937, yaitu pemberdayaan koperasi dan *grameen* Bank.

Muhammadiyah juga harus mengupayakan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan ekonomi umat sehingga Muhammadiyah akan terus menjadi pemandu dalam pengembangan perekonomian umat untuk menyelenggarakan Bank demikian Muhammadiyah melakukan antara lain:

- 1) Menerima simpanan uang dengan pemberian laba
- 2) Menerima simpanan barang dengan biaya administrasi
- 3) Menerima jasa pengiriman uang dan barang serta meminjamkan uang
- 4) Mendirikan usaha seperti pabrik, biro perjalanan, perkebunan dan pertanian.²⁶

Sepak Terjang Gerakan Muhammadiyah Sebelum Merdeka

- a. *Khittah* Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Adapun *khittah* Muhammadiyah sebagai berikut:

- 1) Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan bernegara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama.
- 2) Muhammadiyah meyakini bahwa Negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat yang dalam membangun kehidupan di mana nilai-nilai ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersama dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan dan keadaban untuk terwujud.
- 3) Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- 4) Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan Negara.
- 5) Muhammadiyah meminta dengan segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik dengan sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan dan perdamaian. Aktivitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi persyarikatan dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
- 6) Muhammadiyah selalu bekerja sama dengan golongan manapun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudratan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadilan.²⁷

Peran Muhammadiyah dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Pada dasarnya, majlis Pembina ekonomi membina ekonomi umat dalam tiga hal, yaitu:

- a. Mengembangkan Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang mempersentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah.
- b. Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah.
- c. Memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah.²⁸

Beberapa gerakan Muhammadiyah dalam mengembangkan ekonomi sebagai berikut:

- a. Mendirikan Koperasi, seperti koperasi batik, peralatan rumah tangga dan simpan pinjam
- b. Mendirikan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) dalam berbagai bidang jasa, perdagangan, pariwisata, perkebunan, perikanan dan lain-lain.
- c. Lembaga keuangan untuk mendukung usaha-usaha umat yaitu Baitul Mal wa Tanwil (BMT), BPR Syariah, salah satu contohnya BMT An Ni'ma di Kota Gede, BMT Surya Gamping di Sleman.
- d. *Sharing* dalam berbagai perusahaan yang sukses dibidangnya dan kompetitif.
- e. Membangun jaringan bisnis, seperti memberikan berbagai penjelasan informasi tentang bisnis obat, bahan tekstil, bahan kimia, rumah makan dan lain-lain. Informasi ini juga meliputi tentang kegiatan produksi, pemasaran, tata niaganya dan lain-lain.
- f. Membangun jaringan kerja sama bisnis dengan semua pengusaha dan koperasi Muhammadiyah untuk saling membantu baik dari segi informasi, kiat bisnis maupun pendanaan.²⁹

Hambatan-Hambatan Muhammadiyah dalam melakukan pemberdayaan Ekonomi

- a. Meninggalkan keturunan yang Lemah dibidang Ekonomi

Sebagaimana dikemukakan Anwar Ali Akbar dan Mas'ud, selama ini Muhammadiyah sumber daya yang bisa dijadikan modal. *Pertama*, sumber daya manusia di mana organisasi Muhammadiyah mempunyai SDM maju yang sangat beragam dan berpendidikan. *Kedua*, lembaga yang telah didirikan.

Pada awal perkembangannya, Muhammadiyah telah berhasil mendirikan berbagai macam bangunan sesuai dengan funGerakan Sosial Islam dan orientasi masing-masing yang juga bisa dioptimalkan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi umat. *Ketiga*, organisasi Muhammadiyah, dari pusat sampai ke ranting. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah (MPEM) kembali berubah nama menjadi Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah pada Mukhtamar ke-44 di Jakarta.

Sampai saat ini diakui bahwa belum ada Badan Usaha Milik Muhammadiyah atau lembaga ekonomi lainnya yang bisa diandalkan. Harus diakui bahwa pada point ini, Muhammadiyah itu “kalah” oleh organisasi masyarakat atau yayasan keagamaan lainnya. Sebut saja Daaruttauhid sebagai pendatang baru yang telah mampu membangun dan mengem-bangkan keran-keran ekonomi yang dapat menghidupkan eksistensi lembaga dan memberikan manfaat kepada masyarakat terutama secara ekonomi.

Peran Muhammadiyah bukan sebagai fasilitator bagi warganya untuk berjuang secara ekonomi tetapi malah menjadi inisiator yang kerap kali menimbulkan masalah. Masalah yang terjadi juga dilatarbelakangi oleh berbagai hal, seperti keterbatasan sumberdaya, kurangnya amanah, serta faktor lainnya. Keterpurukan yang dialami Muhammadiyah dalam bidang ekonomi seyogyanya menjadi pelajaran berharga.

Sektor pendidikan dan kesehatan nampaknya bidang yang menonjol di Muhammadiyah. Lembaga pendidikan dan rumah sakit yang dimiliki Muhammadiyah terbukti memiliki andil yang sangat besar dalam menghidupkan eksistensi persyarikatan. Sektor ini telah membantu eksistensi setiap level kepemimpinan di Muhammadiyah, baik dari sisi finansial, apalagi dalam pembentukan kader persyarikatan sehingga diyakini bahwa sektor inimempunyai potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh dan lebih besar. Kembali ke permasalahan ekonomi, Muhammadiyah perlu melakukan revitalisasi yang dijawantahkan dalam berbagai langkah aksi yang strategis dalam mengembangkan bidang tersebut.

Hasil Gerakan NU dalam Pemberdayaan Ekonomi Sebelum Merdeka

NU selain hanya berdiri sebagai organisasi keagamaan dalam arti sempit, juga memperhatikan pula kesejahteraan ekonomi para jam'iyahnya. *Nahdlatut Tujjar* didirikan oleh 45 orang Saudagar santri serta dua orang Kyai berpengaruh yaitu KH.Wahab Chasbullah dan KH.Hasyim Asyari diatas permasalahan sosial ekonomi yang terjadi pada tahun 1918. Nahdlatut Tujjar memiliki visi misi untuk mengangkat kualitas kehidupan masyarakat dalam perekonomian, serta memerangi kolonialisme yang telah melahirkan aneka bentuk eksploitasi dan penindasan di sisi lainnya.

Strategi NU Dalam Pembangunan Ekonomi di Bidang Pertanian

Setelah beberapa lama akibat kompleksnya permasalahan sosial dan keagamaan pada masa perjuangan kemerdekaan KH. Hasyim Al Asy'ari mendirikan koperasi dengan nama *Syirkatul Inan* di Jombang yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu, yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari.

Koperasi ini sangat mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, namun pada waktu itu tidak mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda akhirnya tidak bisa berkembang. Setelah itu pada tahun 1937 Ketua Tanfidhiyah NU KH.Mahfoedz Shidiq mendirikan koperasi Syirkah mu'awwanah untuk memperkuat modal para petani di pedesaan. Kehadiran koperasi ini berupaya membuka jaringan perdagangan antar pesantren yang banyak menghasilkan produk-produk pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya.³⁰

Para kiai, kader NU dan masyarakat didorong mendirikan toko sendiri, dengan logo NU, untuk menjual barang-barang yang diperlukan di pesantren; departamen ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan bisnis mereka, dan para usahawan didorong menjual barang-barang mereka ke toko-toko ini dengan persyaratan yang lebih mudah. Dalam perkembangannya di era reformasi, syirkah mu'awwanah ini berkembang menjadi Baitul Maal wa ta'mil Syirkah Mu'awwanah Nahdlatul Ulama (BMT SM NU) yang bergerak di banyak sektor selain pertanian.³¹

Pesantren tidak hanya mendidik ilmu-ilmu agama kepada para santrinya, namun juga memberikan skill-skill untuk mengembangkan ekonomi, khususnya dalam bertani, berternak dan berdagang melalui koperasi pesantren, contohnya pesantren Sidogiri di Pasuruan, *An Nuqoyah* di Guluk-Guluk Sumenep, *Nurul Jadid* di Paiton Probolingga dan Pesantren *Drajat* di Lamongan.³²

Sehingga selepas dari pesantren, para santri dapat hidup mandiri dengan bertani, berternak, atau menjadi pedagang kecil. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah saatnya pesantren mengembangkan kemandiriannya dengan memperluas basis ekonominya melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi produksi. Dalam mewujudkan hal tersebut yaitu, pesantren harus membuka diri terhadap perkembangan teknologi dan hasil-hasil penelitian dalam pengembangan ekonomi dan menyediakan sumber daya yang memadai melalui pelatihan-pelatihan bagi santri.³³ Jaringan ekonomi pesantren akan dapat menyediakan informasi produksi dan kebutuhan diantara pesantren sehingga pasar dan distribusi produksi ekonomi dari pesantren akan semakin luas.

Nahdlatul Ulama yang beranggotakan para alim Ulama menjadi sebuah lembaga yang menaungi seluruh faktor penyokong pertanian. NU dan pembangunan pertanian Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi masyarakat yang didirikan oleh KH.Hasyim Asyari pada tahun 1926 dan salah satu tujuan berdirinya NU yaitu menyejahterakan para petani desa. Sehingga NU serta perangkatnya akan berperan aktif dalam pembangunan pertanian di pedesaan dengan para ulama, santri dan para masyarakat desa secara bergotong royong dari penyediaan modal hingga pemasaran produk pertanian yang dihasilkan.

Sepak Terjang Gerakan NU Sebelum Merdeka

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh), kebersamaan dan hidup berdampingan antar sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan atau agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi keagamaan, tentunya Nahdlatul Ulama memiliki ciri keagamaan yang dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain:

- 1) Didirikan karena motif keagamaan, tidak karena dorongan politik, ekonomi atau lainnya.
- 2) Berasas keagamaan sehingga segala sikap tingkah laku dan karakteristik perjuangannya selalu disesuaikan dan diukur dengan norma hukum dan ajaran agama.
- 3) Bercita-cita keagamaan yaitu Izzul Islam wal Muslimin (kejayaan Islam dan kaum muslimin) menuju Rahmatan lil 'Alamin (menyebarkan rahmat bagi seluruh alam).
- 4) Menitikberatkan kegiatannya pada bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan keagamaan, seperti masalah ubudiyah, mabarrat, dakwah, ma'arif, muamalah dan sebagainya.³⁴

Sedangkan dalam bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh NU lebih diarahkan kepada pengembangan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh warganya. NU awalnya mendirikan koperasi dengan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti, gula, beras, dan lainnya. Peraturan dasar CKM dalam pembagian keuntungan dibagi 5: 40% untuk pegawai, 15% untuk pemilik modal, 25% untuk menambah modal, 5% untuk juru tulis dan 15% untuk NU. NU juga mendirikan sebuah badan wakaf dengan nama awal *Lajnah Waqfiah* yang bertugas mengurus harta wakaf ataupun harta lain yang tidak berasal dari wakaf, untuk keperluan sosial NU. Tahun 1937 badan ini ditingkatkan menjadi Badan Waqfiah NU, yang tidak hanya mengurus harta wakaf, bukan wakaf tetapi lebih dari itu mempunyai kewenangan untuk membeli, mempunyai atau menguasai (nazir) tanah wakaf, berdasarkan pada asas Islam salah satu dari empat mazhab.

NU juga membentuk sebuah badan yang mengurus persoalan impor barang dari luar negeri dalam penyediaan barang perdagangan pengusaha NU, import handel ini sifatnya otonom di luar organisasi NU untuk menyediakan barang-barang keperluan rumah tangga yang memakai nama dan symbol NU.

Sekitar Juli 1937 ANO cabang Sokaraja telah mendirikan perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga antara lain geretan batu dan sendok makan

dari kuningan.⁴² Salah satu keputusan Konferensi NU ke I Jawa Tengah tanggal 30-31 Oktober 1937, menggalakan produksi alat-alat rumah tangga seperti yang dilakukan oleh ANO Sokaraja, yaitu geretan batu dan sendok dari kuningan.

Bulan Februari 1937, Departemen Pertanian dan Perdagangan NU Cabang Pasuruan mendirikan koperasi petani. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain, menyewa tanah pertanian, memberikan penerangan-penerangan pertanian, memperbaiki nasib petani dan mengurus hasil pertanian pasca panen. Untuk memperbaiki pengelolaan pertanian, NU Cabang Banyumas melakukan pengumpulan modal dan mengurus penjualan hasil pertanian dengan jalan petani NU menyeterkan hasil panen padi selama lima tahun, setiap musim panen dan akan mengusahakan penjualannya disaat harga gabah naik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani NU.

a. Sepak Terjang di Bidang Pendidikan

Nahdlatul Ulama memaknai pendidikan tidak semata-mata sebagai sebuah hak, melainkan juga kunci dalam memasuki kehidupan baru. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Ketiganya merupakan komponen pelaksana pendidikan yang interaktif dan berpotensi untuk melakukan tanggung jawab dan harmonisasi. Gerakan Sosial Islam pendidikan bagi Nahdlatul Ulama adalah, satu, untuk mencerdaskan manusia dan bangsa sehingga menjadi terhormat dalam pergaulan bangsa di dunia, dua, untuk memberikan wawasan yang plural sehingga mampu menjadi penopang pembangunan bangsa.³⁵

Gerakan pendidikan Nahdlatul Ulama sebenarnya sudah dimulai sebelum Nahdlatul Ulama sebagai organisasi secara resmi didirikan. Cikal bakal pendidikan Nahdlatul Ulama dimulai dari berdirinya Nahdlatul Wathan, organisasi penyelenggara pendidikan yang lahir sebagai produk pemikiran yang dihasilkan oleh forum diskusi yang disebut Tashwirul Afkar, yang dipimpin oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah. Organisasi ini mempunyai tujuan untuk memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan sekolah atau madrasah yang teratur.

Mengusahakan terciptanya pendidikan yang baik, maka Nahdlatul Ulama memandang perlunya proses pendidikan yang terencana, teratur dan terukur.

Sekolah atau madrasah menjadi salah satu program permanen Nahdlatul Ulama, disamping jalur non formal seperti pesantren. Sekolah atau madrasah yang dimiliki Nahdlatul Ulama memiliki karakter yang khusus, yaitu karakter masyarakat.

Diakui sebagai milik masyarakat dan selalu bersatu dengan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sejak semula masyarakat mendirikan sekolah atau madrasah selalu dilandasi oleh mental, percaya pada diri sendiri dan tidak menunggu bantuan dari luar. Pada masa penjajahan, Nahdlatul Ulama secara tegas menolak bantuan pemerintah jajahan bagi sekolah atau madrasah dan segala bidang kegiatannya.

Sepak Terjang NU di Bidang Politik

Menurut KH. Ahmad Mustofa Bisri, setidaknya ada 3 jenis politik dalam pemahaman Nahdlatul Ulama, yaitu politik kebangsaan, politik kerakyatan dan politik kekuasaan. Nahdlatul Ulama sejak berdiri memang melakukan aktivitas politik, terutama dalam pengertian yang pertama, yakni politik kebangsaan, karena Nahdlatul Ulama sangat berkepentingan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁶

Dalam sejarah perjalanan Indonesia, tercatat bahwa Nahdlatul Ulama selalu memperjuangkan keutuhan NKRI. Selain dilandasi oleh nilai-nilai ke-Islam-an, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Nahdlatul Ulama juga didasari oleh nilai-nilai ke-Indonesia-an dan semangat nasionalisme yang tinggi.

Menyadari bahwa Nahdlatul Ulama merupakan satu kesatuan yang integral dari para anggotanya dengan aneka ragam latar belakang dan aspirasi masing-masing dan demi mengembangkan budaya politik yang bertanggung jawab, maka Nahdlatul Ulama memberikan pedoman berpolitik sebagai berikut:

- 1) Berpolitik mengandung arti keterlibatan warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Berpolitik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

- 3) Berpolitik dengan mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
- 4) Berpolitik harus dilakukan dengan moral, etika dan budaya sesuai dengan nilai-nilai sila-sila Pancasila.
- 5) Berpolitik harus dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama.
- 6) Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh consensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah.
- 7) Berpolitik dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
- 8) Perbedaan pandangan harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan dan saling menghargai.
- 9) Berpolitik menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional.³⁷

Selanjutnya dalam merespon perkembangan politik pada masa reformasi, Nahdlatul Ulama memfasilitasi pendeklarasian sebuah partai politik. Pendeklarasian partai tersebut bertujuan untuk menyalurkan dan memproses warga *nahdliyin* yang ingin berkiprah dalam politik praktis agar menjadi politisi sejati, yang pada gilirannya menjadi negarawan. Pada sisi lain, Nahdlatul Ulama memberikan kebebasan pada warganya untuk memasuki partai politik manapun yang diyakininya dapat menjadikan dirinya sebagai politisi sejati dan negarawan.

Hambatan NU dalam Gerakan Pemberdayaan Ekonomi

Kendala utama dalam pemberdayaan masyarakat NU lebih disebabkan kebanyakan masyarakat NU berada dalam garis kemiskinan yang berada di desa-desa. Nahdlatul Ulama sudah bertindak tiga belas tahun lamanya.³⁸

Pegangan agama menjadi lemah karena miskin dan banyak meninggalkan ibadah seperti salat Jum'at dan puasa demi pekerjaan. Kemiskinan banyak umat Islam memikirkan diri sendiri tanpa mau memikirkan umat. Kemiskinan menyebabkan hilangnya peluang bisnis warga NU dan tidak dapat menegakkan syari'at dalam bisnis yang berlaku.

Pengelolaan zakat, pada masa itu ide pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat telah berkembang di sebagian kiai NU, bersandar kepada pendapat imam al-Qoffal (meskipun dianggap *dhaif* oleh mayoritas kiai NU) bahwa zakat dapat dikelola untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan sarana ibadah dan pendidikan (masjid, madrasah dan pesantren).¹⁵ Zakat fitrah pun sebagaimana didasarkan pada kitab *Anwar* juz 1, dalam kondisi tertentu dapat dijual untuk pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat seperti pendidikan, pandangan NU tidak melupakan pokok dari pemberdayaan, yaitu institusi pemberdayaan itu sendiri. Hal ini terlihat dengan diberikannya hukum boleh bagi sekolah yang menarik uang (SPP) dari murid oleh sekolah untuk biaya operasional sekolah dan honor guru. Pandangan ini didasarkan dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin*.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang bisnis sangat nyata dalam faham keagamaan NU. Faham keagamaan NU menganjurkan adanya pemanfaatan peluang bisnis, sebagaimana diperbolehkannya bagi seorang yang menerima gadai untuk memanfaatkan barang gadaian yang ada pada dirinya. Disandarkan pada kitab *I'anatu Thalibin*, NU menganjurkan untuk memanfaatkan rasa kegembiraan hari besar Islam agar menjual barang yang semakin menyemarakkan hari besar tersebut. Jual-beli mercon merupakan salah satunya.

Faham keagamaan NU juga menganjurkan untuk tidak membatasi rekanan bisnis, bersandarkan kitab *I'anatu Thalibin*, umat Islam dibolehkan untuk melakukan kontak bisnis dengan orang non Muslim. Bisnis sewa menyewa dengan orang non Muslim diperbolehkan meskipun barang sewaan nantinya dimanfaatkan untuk ritual ibadah penyewa. Sawah yang digarapkan kepada orang non Muslim dibolehkan dalam pandangan NU, bahkan tidak ada kewajiban mereka membayar zakat.

Masyarakat pendukung NU lebih banyak dari golongan ekonomi lemah antara lain, pedagang kecil, pengerajin, petani, buruh tani dan sebagian kecil tuan tanah yang kebanyakan diantaranya adalah kiai. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh NU lebih diarahkan kepada pengembangan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh warganya.

Badan ini mengadakan pertemuan pengurus bertempat di kediaman K.H. Wahab Chasbullah tanggal 3 Januari 1939, dihadiri oleh K.H. Bisri, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, K.H. Noer, H. Burhan, H. Ichsan, H. Saleh Sjamil, H. Nawawi Amin dan Soedarmo Umar Sanusi. Agenda pertemuan adalah pergantian pengurus, pembentukan secretariat, pembentukan Komisi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga. Pengurus Badan Waqfiah NU terpilih adalah Ketua K.H. Noer, Wakil Ketua H. Saleh Sjamil, Bendahara H. Boerhan, Sekretaris Soedarmo Umar Sanusi. Sedangkan anggota Komisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah K.H. Machfudz Siddiq, Soedarmo Umar Sanusi, K.H. Wahab Chasbullah, H. Nawawi Amin, Komisi ini bertugas untuk membuat rancangan AD/ART yang akan diusulkan pada muktamar NU ke 15 di Surabaya, badan ini tahun 1939 mempunyai kekayaan sebesar f527,67,-.

Muktamar ke XIII di Menes, Juni 1938 Pengurus Besar NU memutuskan untuk membentuk sebuah badan yang mengurus persoalan impor barang dari luar negeri dalam penyediaan barang perdagangan pengusaha NU, import handel ini sifatnya otonom di luar organisasi NU untuk menyediakan barang-barang keperluan rumah tangga yang memakai nama dan symbol NU. Setiap cabang diwajibkan mendirikan badan perdagangan di luar NU dengan modal sedikitnya f 500,- untuk menjadi pedagang antara (*tusschen-handel*).³⁹ Dalam muktamar ini juga direncanakan mendirikan *Lajnah Maliyah* atau Bank Islam atas usul cabang Krui, yang kemudian dibentuk komisi yang mengurus hal itu.

Ketua HBNO, K.H. Machfud Siddiq tahun 1939 memelopori berdirinya badan-badan koperasi yang disebut dengan Syirkah Mu'awwanah di setiap cabang NU. Koperasi ini terlihat mencapai kemajuan di beberapa cabang antara lain Surabaya, Singosari, Malang, Gresik dan Bangilan. Saat itu direncanakan untuk melakukan impor sepeda dari Singapura, namun gagal. Keberhasilan yang dicapai adalah impor barang pecah belah dari Jepang yang diberi simbol NU.

Bulan Februari 1937, Departemen Pertanian dan Perdagangan NU Cabang Pasuruan mendirikan koperasi petani. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain, menyewa tanah pertanian, memberikan penerangan-penerangan pertanian, memperbaiki nasib petani dan mengurus hasil pertanian pasca panen.⁴⁴ Untuk memperbaiki pengelolaan pertanian, NU Cabang Banyumas melakukan

pengumpulan modal dan mengurus penjualan hasil pertanian dengan jalan petani NU menyeterkan hasil panen padi selama lima tahun, setiap musim panen dan akan mengusahakan penjualannya disaat harga gabah naik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani NU.

Kesimpulan

Dari beberapa pola gerakan ormas di Indonesia ada yang bersifat gerakan sosial ekonomi yang bersifat ekstrim, sekuler dan konservatif, tetapi pola gerakan yang dilakukan oleh ormas SDI, Muhammadiyah, dan NU memiliki gerakan yang bersifat Tradisionalis-Konservatif/Moderat dan modern artinya faham ideologi, sosial dan ekonomi yang berakomodasi sama dengan bangsa ini. Pada dasarnya munculnya gerakan ormas SDI, Muhammadiyah, dan NU dikarenakan karena politik pemerintah yang diskriminatif, kondisi prekonomian masyarakat pribumi yang sangat memprihatinkan, dan maraknya kristianisasi di kalangan umat Islam. Gerakan yang diberikan oleh SDI, Muhammadiyah, dan NU kepada masyarakat sangat memberikan dampak yang positif baik itu dari ideologi, politik, sosial terlebih khusus dibidang ekonomi.

Dengan memberikan gerakan ekonomi, politik, ideologi dan lain sebagainya kepada masyarakat dengan penuh semangat untuk mengangkat derajat bangsa ini dari penjajahan pada waktu itu, dapat memberikan motivasi bagi kita terutama umat Islam pada saat sekarang ini, bagaimana kita dapat memberikan gerakan yang positif untuk umat yang lain yang masih kekurangan. Hambatan-hambatan SDI dalam memberdayakan ekonomi umat diantaranya, pemerintah Belanda tidak memberikan leluasa kepada ormas SDI untuk berkembang, dan pemerintah Belanda lebih memberikan keluasaan kepada pedagang China. Selanjutnya konflik yang terjadi di tubuh SDI, akibatnya program-program yang dibuat SDI tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hambatan-hambatan Muhammadiyah dalam memberdayakan ekonomi umat merupakan terjadinya perubahan paradigma di tubuh Muhammadiyah, perubahan paradigma ini berawal dari karakter kepemimpinan yang dibangun.

Sebagaimana telah dijabarkan bahwa Muhammadiyah lahir dan dikembangkan oleh naluri para pedagang, sedangkan periode penerusnya banyak dipimpin oleh para pegawai atau karyawan yang kurang memiliki naluri bisnis, sehingga bisnis apapun yang dikembangkan akan sulit untuk berkembang.

Hambatan-hambatan NU dalam memberdayakan ekonomi umat yang pertama adalah minimnya dana organisasi NU pada awal berdirinya, sehingga sulit untuk membuat pemberdayaan kepada masyarakat dan yang kedua sukar mendapatkan pemimpin-pemimpin yang cakap dan banyak pemimpin NU yang karena kemiskinannya kemudian melakukan penyimpangan seperti, minta dipilih menjadi kepala desa atau di angkat menjadi penghulu.

Berdasarkan temuan peneliti, maka disarankan agar program gerakan-gerakan dan kebijakan yang diberikan oleh SDI kepada masyarakat muslim tetap berlanjut sehingga mampu mengimbangi para pedagang Tionghoa yang pada waktu itu memiliki kemampuan dagang yang lebih besar dibandingkan pedagang muslim. Kegiatan gerakan yang diberikan oleh Muhammadiyah mampu menggerakkan perekonomian sehingga dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat muslim dan meningkatkan sumber daya manusianya seperti mendirikan Bank Muhammadiyah, BUMM (badan usaha milik Muhammadiyah), koperasi dan sekolah-sekolah sudah cukup baik. Pemberian pemberdayaan oleh NU untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan perkotaan pada waktu itu sangat baik seperti membuat gagasan bersama dengan pemerintah, mengadakan jaringan ekonomi ke perkotaan dan pedesaan dan membuat koperasi umat, namun kebijakan itu tidak bertahan lama karena NU lebih fokus yang bersifat kepada keagamaan dan politik.

Catatan

¹ Lukman Santoso Az, *Gerakan Separatis Islam*, (Yogyakarta: Pelapa, 2014), h. 46

² Lihat penjelasan Syahbudi, "Pemikiran dan Gerakan system ekonomi Islam di Indonesia", dalam jurnal Hermeneia kajian Islam Interdisipliner Vol. 2 Juli-Desember 2013

³ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam perubahan*, (Jakarta: P3M, 1986), h.35

⁴ Syahbudi, *Pemikiran...*

⁵ Miftahuddin. *Peran organisasi Islam dari perjuangan menuju kemerdekaan sampai masa perang mempertahankan kemerdekaan (1936-1949)*. Jurnal Ahkam Vol, XI No. 3, UIN Bandung, 2012

⁶ Lukman Santoso Az, *Gerakan Separatis Islam*, (Yogyakarta: Palapa, 2014), h. 45

⁷ Syahbudi, "Pemikiran dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia", dalam jurnal Hermeneia Kajian Islam Interdisipliner Vol. 2 Juli-Desember 2013.

⁸ Lihat Soegijanto Padmo, "Peran Organisasi Islam dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan Sampai Masa Perang Mempertahankan Kemerdekaan", dalam Jurnal Humaniora, Vol. IX No, 2 Juni 2007.

⁹ Syarifuddin Jurdi, "Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan" dalam jurnal Politik Protetik, Vol. 1 No, 1 Tahun 2013.

¹⁰ Harton dan Hunt, *Sosiologi Jilid 2*, ter. Aminuddin Ram dan Tita Sobari, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 58

¹¹ Noorhaidi Hasan, h. 33

¹² John Lofland, *Social Movement Organizations* (New York: Guide to Research on Insurgent Realities, Aldien de Gruyter, 1996); bandingkan dengan Ngadisah, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua* (Yogyakarta: Raja, 2003), h. 171-242

¹³ Muhammad Yafiz, *Argumen Integrasi Islam & Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 46-48

¹⁴ Tadi telah disinggung pula tentang kelompok ini, tapi penjelasan berikut ini melihat kecenderungan orientasi gerakannya dan bukan pada level pemikiran dan tafsir atas doktrin seperti telah dijelaskan.

¹⁵ Tadi telah disinggung pula tentang kelompok ini, tapi penjelasan berikut ini melihat kecenderungan orientasi gerakannya dan bukan pada level pemikiran dan tafsir atas doktrin seperti telah dijelaskan.

¹⁶ Muhammad Yafiz, h. 47

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. 7, (Bandung, Tarsito, 1982)

¹⁸ Alwi Shihab, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung, Mizan, 1998)

¹⁹ Mudjita Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", dalam <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2017

²⁰ Hok Gie Soe, *Dibawah Lentera Merah*, (Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya, 1999), h. 5

²¹ Roeslan Abdul Ghani, *Politik dan Ilmu*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1902), h. 44

²² *Ibid*, h. 46

²³ George D, Larson, *Masa menjelang revolusi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), h. 56

²⁴ Dalier Noer, *Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1973), 112

²⁵ *Ibid*, h. 114

²⁶ Mujahid Quraisy, "Dinamika Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia,"

²⁷ Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adabi Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2000), h. 70-71

²⁸ Agus, *Peran Muhammadiyah dalam Kehidupan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 86

²⁹ Ihyaul Ulum. Gerakan Ekonomi Muhammadiyah. [www.http://ihyaul.staff.umm.ac.id](http://ihyaul.staff.umm.ac.id) diakses 29 September 2017

³⁰ *Ibid*, h. 36

³¹ Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah*, (Surabaya: Khalista, 2007), h. 121

³² Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan*, (Jakarta: P3M, 1986), h. 35

³³ *Ibid*, h. 37

³⁴ Umaruddin Masdar, *Pemikiran Politik 9 Ulama Besar NU: Tradisi NU*, (Jakarta: DPP PKB, 2008), h. 54

³⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 69

³⁶ KH. Bishri Syansuri, *Cita-Cita dan Pengabdiannya*, (Surabaya: Al-Ikhlas Press, 1983), h. 23

³⁷ A. Gaffar Karim, h. 98

³⁸ Berita Nahdlatoel 'Oelama, 15 Februari 1939, h.171

Daftar Pustaka

Agus. *Peran Muhammadiyah dalam Kehidupan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Az, Lukman Santoso. *Gerakan Separatis Islam*. Yogyakarta: Pelapa, 2014.

Berita Nahdlatoel 'Oelama, 15 Februari 1939.

Ghani, Roeslan Abdul. *Politik dan Ilm*. Jakarta: Yayasan Prapanca. 1902.

Harton, dan Hunt. *Sosiologi Jilid 2*. Ter. Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga, 1992.

Ihyaul Ulum. *Gerakan Ekonomi Muhammadiyah*. Diambil dari [www.http://ihyaul.staff.umm.ac.id](http://ihyaul.staff.umm.ac.id) diakses 29 September 2017

Jurdi, Syarifuddin. *Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan*. Jurnal Politik Protetik, Vol. 1 No, 1 Tahun 2013.

Larson, George D. *Masa Menjelang Revolusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1990.

Lofland, John. *Social Movement Organizations*. New York: Guide to Research on Insurgent Realities, Aldien de Gruyter. 1996.

Masdar, Umaruddin. *Pemikiran Politik 9 Ulama Besar NU: Tradisi NU*. Jakarta: DPP PKB. 2008.

Miftahuddin. *Peran Organisasi Islam dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan Sampai Masa Perang Mempertahankan Kemerdekaan (1936-1949)*. Jurnal Ahkam Vol, XI No. 3, UIN Bandung, 2012.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.

Ngadisah. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua* . Yogyakarta: Raja. 2003.

Noer, Dalier. *Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES. 1973.

- Padmo, Soegijanto. *Peran Organisasi Islam dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan Sampai Masa Perang Mempertahankan Kemerdekaan*. Jurnal Humaniora, Vol. IX No, 2 Juni 2007.
- Pasha, Mustafa Kamal, dan Ahmad Adabi Darban. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: LPPI UMY. 2000.
- Quraisy, Mujahid. *Dinamika Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jurnal ahkam Khazanah Islam Vol 3, November, 2014.
- Rahardjo, Mudjita. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Diambil dari <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2017
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan. 1998.
- Soe, Hok Gie. *Dibawah Lentera Merah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1999.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. 7. Bandung, Tarsito. 1982.
- Syahbudi, *Pemikiran dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*. Jurnal Hermeneia Kajian Islam Interdisipliner Vol. 2 Juli-Desember 2013.
- Syansuri, KH. Bishri. *Cita-Cita dan Pengabdiannya*. Surabaya: Al-Ikhlash Press. 1983.
- Tim PWNJ Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah*. Surabaya: Khalista. 2007.
- Yafiz, Muhammad. *Argumen Integrasi Islam & Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2015.
- Ziemek, Manfred. *Pesantren dalam Perubahan*. Jakarta: P3M. 1986.
- _____ *Pesantren dalam Perubahan*, Jakarta: P3M, 1986.